

**PERILAKU GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA PADANG
PERIODE 2013-2018
DI KECAMATAN KOTO TANGAH**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik sebagai salah
satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

**RIDHO PRIMANANDA
18599/2010**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2015**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Perilaku Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-2018 di Kecamatan
Koto Tengah
Nama : Ridho Primananda
NIM/TM : 18599/2010
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2015

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Nurman S., M.Si
NIP. 19590409 198503 1 002


Drs. Survanef, M.Si
NIP. 19640606 199103 1 006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis Tanggal 26 Maret 2015 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Perilaku Golongan Putih (Golput)
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-2018
di Kecamatan Koto Tengah**

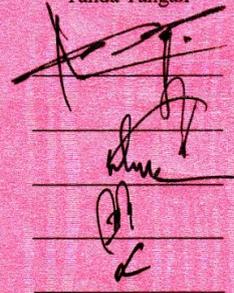
Nama : Ridho Primananda
NIM/TM : 18599/2010
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2015

Tim Penguji

Nama
Ketua : Drs. Nurman S, M.Si
Sekretaris : Drs. Suryanef, M.Si
Anggota : Dr. Helmi Hasan, M.Pd
Anggota : Alia Azmi, S.IP, M.Si
Anggota : Dr. Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syatri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ridho Primananda

NIM/TM : 18599/2010

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perilaku Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-2018 di Kecamatan Koto Tangah”** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, April 2015

Saya yang menyatakan


Ridho Primananda
18599/2010

ABSTRAK

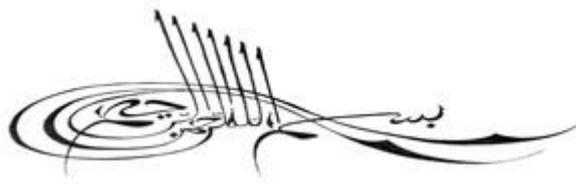
Ridho Primananda : Perilaku Golongan Putih (golput) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-2018 di Kecamatan Koto Tengah

Pada Pemilukada kota Padang yang diselenggarakan dua kali putaran pemilihan masih terdapat angka golongan putih yang cukup tinggi. Di antara sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang, Kecamatan Koto Tengah memiliki tingkat golongan putih yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang lainnya yaitu pada putaran pertama sebanyak 43% dan pada putaran kedua meningkat menjadi 45.7%. Oleh sebab itu penulis ingin melihat faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka golongan putih pada Pemilukada Kota Padang dan ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Padang dalam meminimalisir angka golongan putih untuk pemilu yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan cara reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*) dan mengambil kesimpulan kemudian diverifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor penyebab golput masyarakat pada Kecamatan Koto Tengah disebabkan oleh, 1) Faktor Psikologis, datang dari hati nurani yang menganggap semua calon kandidat tidak memiliki kompetensi. 2) Faktor Sistem Politik yaitu disebabkan oleh campur tangan partai politik sebagai kendaraan bagi calon kandidat, serta tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan seperti *black campaign*, *money politik* dan lain-lain. 3) Faktor Kepercayaan Politik disebabkan oleh rasa pesimis masyarakat terhadap kualitas calon kandidat, 4) Faktor Sosial-Ekonomi disebabkan oleh kegiatan masyarakat yang lebih mengutamakan untuk mencari nafkah dibandingkan untuk menggunakan hak pilih. Untuk menimalisir hal ini, maka KPUD Kota Padang berupaya 1) Meningkatkan sosialisasi, 2) Inisiatif melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, 3) Kampanye sehat calon kandidat ataupun partai politik. Saran penulis pada penelitian ini kepada lembaga yang mempunyai kewenangan agar lebih memperjelas aturan dan UU yang terkait dengan pelaksanaan pemilu agar masyarakat memiliki kesadaran dalam berpolitik, terutama kepada KPUD Kota Padang agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk menimalisir tingkat golput masyarakat pada pemilu yang akan datang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " **Perilaku Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-2018 di Kecamatan Koto Tengah** ".

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Padang sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama dibangku perkuliahan.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta staf dan karyawan/ti yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.

2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan beserta staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Nurman, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan, arahan, nasehat, masukan, dan petunjuk yang sangat berharga kepada penulis.
4. Pembimbing II Bapak Drs. Suryanef, M.Si yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan yang sangat berarti kepada penulis.
5. Penguji/kontributor yaitu Bapak Dr. H. Helmi Hasan, M. Pd, Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D, Ibu Alia Azmi, S. IP. M. Si, yang telah memberikan masukan, saran-saran, arahan dan koreksi selama penulisan skripsi ini.
6. Ketua KPU Kota Padang beserta staff, PPK Kecamatan Koto Tangah yang telah memberikan izin dan ikut membantu dalam proses penelitian ini.
7. Sahabat dan teman-temanku yang telah mendo'akan, memberikan semangat, dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawan *Civic Education 2010* atas dukungan dan kebersamaannya.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materiil di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati maka penulis sangat

mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis sangat berharap dengan Rahmat dan Izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan pada umumnya.

Padang, 24 Januari 2015

Penulis,

Ridho Primananda

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	11
1. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).....	11
2. Golongan Putih (Golput)	14
3. Faktor-faktor Penyebab Golput	16
a. Faktor Psikologis.....	17
b. Faktor Sistem Politik.....	17
c. Faktor Kepercayaan Politik.....	18

d. Faktor Sosial Ekonomi.....	18
4. Akibat Golongan Putih bagi Demokrasi.....	20
B. Kerangka Konseptual	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Informan Penelitian	23
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	25
1. Jenis dan Sumber Data.....	25
2. Teknik Pengumpul Data	26
3. Alat Pengumpul Data.....	27
E. Uji Keabsahan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	31
1. Temuan Umum	31
a. Profil Kecamatan Koto Tengah.....	31
b. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang	36
2. Temuan Khusus	45
a. Faktor-faktor yang Menyebabkan Sikap Golput Masyarakat Kecamatan Koto Tengah pada Pemilu pada Kota Padang.....	45
1) Faktor Psikologis	50
2) Faktor Kepercayaan Politik.....	54

3) Faktor Sosial Ekonomi	60
4) Faktor Sistem Politik	64
b. Upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	
Kota Padang dalam Meminimalisir Tingginya Angka Golput	
pada Pemilukada Selanjutnya	75
1) Peningkatan Proses Sosialisasi	76
2) Memanfaatkan Peranan Tokoh-tokoh Masyarakat.....	83
3) Kontribusi Calon Kandidat untuk Melakukan	
Kampanye Sehat.....	86
B. Pembahasan	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pemilukada Kota Padang Putaran	3
Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pemilukada Kota Padang Putaran II.....	4
Tabel 3.1 Informan Kunci	24
Tabel 3.2 Informan Non Kunci	25
Tabel 4.1 Luas Daerah Kecamatan Koto Tangah Menurut Kelurahan di Kota Padang	33
Tabel 4.2 Kondisi Demografi Kota Padang Tahun 2013.....	34
Tabel 4.3 Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Tahun 2013	35
Tabel 4.4 Statistik Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Pertama Di Tingkat Kecamatan Koto Tangah.....	46
Tabel 4.5 Statistik Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua Di Tingkat Kecamatan Koto Tangah	47
Tabel 4.6 Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Pekerjaan.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	21
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Koto Tengah	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPU Kota Padang	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 3. Surat izin penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang

Lampiran 4. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari KPU Kota Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kenegaraan sebagai pelaksanaan dari sistem demokrasi yang ada pada suatu negara. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan (May Rudy, 2007: 87). Pemilihan umum menurut Dieter Nohlen dibagi menjadi 2 pandangan, dalam arti luas, pemilihan umum ialah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit pemilu ialah cara pemilih dalam mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, dimana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik (Basri, 2011: 126). Objek pemilihan umum ini tidak lain adalah manusia itu sendiri, bagaimana manusia berstatus pemilih. Keikutsertaan manusia itu sendiri sangat diperlukan dalam sebuah pemilihan umum. Dalam mencapai hal tersebut ialah lewat sosialisasi politik yang nantinya akan berimplementasi pada partisipasi politik, semua itu tentunya dilakukan oleh Partai Politik.

Pelaksanaan pemilihan umum, baik legislatif, presiden ataupun kepala daerah (pilkada) selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih atau golput. Entah kenapa golongan yang satu ini selalu menjadi sosok yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Disebut mengkhawatirkan karena golongan ini dinilai sosok yang tidak mendukung pesta demokrasi yang sudah ada sejak dulu di negeri ini, dan jumlahnya cukup banyak bahkan menyamai

dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi dalam suatu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Angka golongan putih (golput) atau *voter's turn out* (VTO) apalagi jika sudah melebihi dari jumlah suara pemenang, maka tentunya akan sulit untuk mengatakan bahwa kemenangan calon/kandidat adalah sudah merepresentasikan kemauan sebagian besar masyarakat, lebih jauh lagi efek turunannya adalah sukar untuk membangun logika tentang dukungan maksimal dari masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang (Rabbani, 2013: 11-12). Hal ini salah satunya dapat kita lihat pada pemilihan kepala daerah Kota Padang yang dilaksanakan dua kali putaran pemilihan, yang mana putaran pertama diikuti oleh 10 pasangan calon walikota dan wakil walikota sedangkan pada putaran kedua merupakan lanjutan dari putaran pertama yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Jika dilihat berdasarkan statistik tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilukada Kota Padang cukup memprihatinkan. Dari 561.189 total pemilih yang terdaftar secara resmi pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPUD Kota Padang, yang ikut menggunakan hak suaranya pada Pemilukada Kota Padang putaran pertama hanya berjumlah sebanyak 315.966 suara. Sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah sebanyak 245.223 suara. Sehingga dari jumlah angka tersebut, partisipasi politik masyarakat Kota Padang pada Pemilukada Kota Padang tergolong sangat rendah. Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Padang pada putaran pertama :

**Tabel. 1.1 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Pemilukada Kota Padang Putaran I**

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH											
		SALINAN DPT			MENGUNAKAN HAK PILIH			TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH			DARI TPS LAIN		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	PADANG SELATAN	20.367	20.950	41.317	10.305	13.255	23.560	10.062	7.695	17.757	215	164	379
2	PADANG TIMUR	26.929	28.193	55.122	12.377	16.343	28.720	14.552	11.850	26.402	363	503	866
3	PADANG BARAT	16.006	16.312	32.318	7.949	9.475	17.424	8.057	6.837	14.894	205	230	435
4	PADANG UTARA	18.138	19.176	37.314	8.854	11.160	20.014	9.284	8.016	17.300	239	284	523
5	BUNGUS TELUK KABUNG	8.056	7.880	15.936	4.442	5.388	9.830	3.614	2.492	6.106	100	107	207
6	LUBUK BEGALUNG	35.633	36.458	72.091	18.489	23.707	42.196	17.144	12.751	29.895	287	360	647
7	LUBUK KILANGAN	15.856	16.092	31.948	7.817	9.963	17.780	8.039	6.129	14.168	303	377	680
8	PAUH	18.776	18.768	37.544	9.580	12.089	21.669	9.196	6.679	15.875	231	246	477
	KURANJI	43.319	44.102	87.421	21.156	27.991	49.147	22.163	16.111	38.274	603	744	1.347
	NANGGALO	17.850	19.237	37.087	9.329	12.325	21.654	8.521	6.912	15.433	274	265	539
	KOTO TANGAH	56.035	57.056	113.091	27.928	36.044	63.972	28.107	21.012	49.119	668	860	1.528
	JUMLAH	276.965	284.224	561.189	138.226	177.740	315.966	138.739	106.484	245.223	3.488	4.140	7.628

Sumber : KPUD Kota Padang Tahun 2014

Rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Padang pada Pemilukada Walikota dan Walikota Padang pada putaran pertama memberikan bukti nyata bahwa tingkat Golput di ibukota Provinsi Sumatera Barat ini cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya KPUD Kota Padang selaku lembaga penyelenggara Pemilukada Kota Padang mengevaluasi penyebab utama atas permasalahan yang terjadi terkait dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat dihindari pada pelaksanaan Pemilukada Kota Padang putaran kedua. Akan tetapi, pada penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang putaran kedua, kondisi yang terjadi malah sebaliknya. Tingkat golput masyarakat semakin meningkat yaitu naik sekitar 4.1% dari pada putaran pertama. Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Padang pada putaran kedua :

**Tabel. 1.2 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Pemilukada Kota Padang Putaran II**

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH											
		SALINAN DPT			MENGGUNAKAN HAK PILIH			TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH			DARI TPS LAIN		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	PADANG SELATAN	20.311	20.911	41.222	9.768	12.363	22.131	10.543	8.548	19.091	215	252	467
2	PADANG TIMUR	26.817	28.089	54.906	11.414	15.163	26.577	15.403	12.926	28.329	436	591	1.027
3	PADANG BARAT	15.999	16.308	32.307	7.079	8.714	15.793	8.920	7.594	16.514	260	274	534
4	PADANG UTARA	18.118	19.156	37.274	7.992	10.527	18.519	10.126	8.629	18.755	229	264	493
5	BUNGUS TELUK KABUNG	8.048	7.881	15.929	4.070	4.920	8.990	3.978	2.961	6.939	74	69	143
6	LUBUK BEGALUNG	35.505	36.339	71.844	16.595	22.259	38.854	18.910	14.080	32.990	352	446	798
7	LUBUK KILANGAN	15.901	16.127	32.028	7.298	9.626	16.924	8.603	6.501	15.104	408	494	902
8	PAUH	18.723	18.747	37.470	8.623	11.406	20.029	10.100	7.341	17.441	350	177	527
9	KURANJI	43.245	44.017	87.262	19.101	25.705	44.806	24.144	18.312	42.456	759	857	1.616
10	NANGGALO	17.792	19.204	36.996	8.147	11.058	19.205	9.645	8.146	17.791	280	210	490
11	KOTO TANGAH	56.009	57.038	113.047	25.924	33.610	59.534	30.085	23.428	53.513	820	1.048	1.868
JUMLAH		276.468	283.817	560.285	126.011	165.351	291.362	150.457	118.466	268.923	4.183	4.682	8.865

Sumber : KPUD Kota Padang Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, dari jumlah pemilih masyarakat Kota Padang yang terdiri dari 11 Kecamatan secara keseluruhan dapat dilihat bahwa masih tingginya angka tidak memilih atau golput pada Pemilihan umum kepala daerah Kota Padang yang diselenggarakan dengan dua kali putaran pemilihan. Jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kota Padang putaran pertama sebanyak 245.223 suara dan pada putaran kedua naik menjadi 268.923 suara dari jumlah keseluruhan DPT yaitu 561.189 pada putaran pertama dan 560.285 pada putaran kedua. Jika dilihat dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2013-2018 yang diselenggarakan dengan dua kali putaran pemilihan, Kecamatan Koto Tangah memiliki angka tidak memilih atau golput yang paling tinggi, yaitu sebanyak 49.119 pada putaran pertama

dan 53.513 pada putaran kedua. Karena alasan itulah, Kecamatan Koto Tangah dipilih oleh penulis menjadi lokasi untuk diadakannya penelitian ini.

Menurut SP Varma (2001:295) terjadinya golput dinegara berkembang seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme. Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi.

Menurut Subagio (2008: 12) golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan. Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu baik janji politik, *money politic* dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi pasca reformasi yang tak kunjung membaik.

Sementara itu Priyatmoko (1992:2) mengartikan golput sebagai keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada even pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah disebabkan rasa

kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tak banyak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat. Lain kata, masyarakat dalam taraf ini telah berada dalam taraf kesadaran dalam memaknai pemilu. Bahwa setiap tindakan mereka dikaitkan dengan pertimbangan asas timbal balik secara seimbang.

Dalam sistem politik yang demokratis, menggunakan hak pilih akan lebih efektif untuk melakukan perubahan dibandingkan mengambil posisi golput. Menggunakan hak pilih merupakan upaya optimal untuk membuat perubahan yang diinginkan menjadi lebih nyata. Kesuksesan Pemilu ditopang antara lain oleh tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Jika dilihat dengan fakta yang terjadi pada Pemilukada Kota Padang tepatnya di Kecamatan Koto Tangah yang memiliki tingkat golput masyarakat yang cukup tinggi, sangat bertolak belakang dengan makna sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Padahal di negara yang menganut paham demokrasi sangat diharapkan kontribusi masyarakatnya untuk ikut berperan serta dalam menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai wadah bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut menentukan pemimpin yang baik di daerah mereka. Namun pada kenyataannya kesadaran politik masyarakat Kecamatan Koto Tangah masih tergolong cukup rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka golput pada Kecamatan ini.

Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan terbesar diantara kecamatan lain yang ada di Kota Padang. Dari rekapitulasi hasil Pemilukada Kota Padang 2013 kemarin oleh KPU Kota Padang, tercatat Kecamatan Koto

Tengah merupakan salah satu kecamatan dengan angka golongan putih tertinggi diantara sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang. Pada Pemilukada Kota Padang putaran pertama yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2013 lalu yang diikuti oleh sepuluh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, tercatat dari 113.091 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Koto Tengah hanya 63.972 saja yang menggunakan hak suaranya. Berarti jika dipersentasekan, hanya 57% yang ikut memilih dan sekitar 43% dapat dikatakan sebagai bagian dari golongan putih (golput). Sedangkan pada putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2014, yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, di Kecamatan Koto Tengah tercatat dari 113.047 Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya sebanyak 59.534 saja yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Jika dipersentasekan, hanya sekitar 54,3% saja yang ikut memilih dan yang menjadi bagian dari golongan putih ada sekitar 45,7%. Dari data tersebut dapat dilihat terjadinya peningkatan angka golongan putih di Kecamatan Koto Tengah sebanyak 2.7% dari putaran pertama ke putaran kedua.

Hal tersebut disebabkan adanya sikap masa bodoh, tidak adanya perhatian dan minat terhadap gejala sosial politik termasuk kegiatan politik. Pemilu menurut mereka adalah bagian dari kegiatan politik, sehingga tidaklah perlu memberi kontribusi pada pemilu tersebut, hal ini yang diindikasikan menyebabkan adanya golput. Golput dalam pemilihan merupakan hak warga negara, namun alangkah baiknya apabila hak suara mereka dapat dipergunakan untuk memilih pemimpin yang tepat, karena satu suara pun sangat

berpengaruh. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Perilaku Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2013-2018 di Kecamatan Koto Tengah”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah, yaitu:

1. Rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Padang pada Pemilihan Walikota dan Walikota Padang memberikan bukti nyata bahwa tingkat Golput di Ibukota Provinsi Sumatera Barat ini cukup tinggi di bandingkan daerah lain.
2. Kecamatan Koto Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki angka golput paling tinggi dibandingkan Kecamatan yang lainnya Pada Pemilihan Walikota Kota Padang.
3. Tingginya tingkat golput masyarakat Kecamatan Koto Tengah disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya sikap apatis masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Padang.
4. Kurangnya pembekalan pendidikan politik dan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Walikota oleh KPU Kota Padang selaku lembaga penyelenggara pemilu.

C. Batasan Masalah

Pemilihan kepala daerah Kota Padang merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih wakilnya dalam menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi untuk menggunakan hak suara mereka dan lebih memilih

untuk berperilaku *non-voting* terhadap pelaksanaan Pemilu Kota Padang yang diselenggarakan dengan dua kali putaran pemilihan. Untuk itulah penulis ingin melihat penyebab timbulnya perilaku golput masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kota Padang yang diselenggarakan dengan dua kali putaran pemilihan. Selain itu penulis juga ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Padang dalam menangani perilaku golput masyarakat untuk pemilu yang akan datang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan tingginya angka golongan putih di Kecamatan Koto Tangah pada pelaksanaan Pemilu Kota?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam meminimalisir golongan putih pada pemilihan kepala daerah Kota Padang yang akan datang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya angka golongan putih di Kecamatan Koto Tangah pada pelaksanaan Pemilu Kota Padang yang diselenggarakan dengan dua kali putaran pemilihan.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam meminimalisir golongan putih pada pemilihan kepala daerah Kota Padang yang akan datang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan khazanah keilmuan terkait dalam bidang politik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penulisan ini secara praktis adalah untuk memberikan gambaran empiris kepada penulis, KPUD Kota Padang, masyarakat, pemerintah serta peneliti selanjutnya berkaitan dengan penyebab munculnya sikap golput apatis masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Padang 2013 khususnya di Kecamatan Koto Tengah. Tentunya hal ini juga dapat melihat upaya yang dilakukan untuk menganani sikap apatis masyarakat pada Pemilu selanjutnya.